

LANDASAN ETIKA DALAM EKONOMI ISLAM

Rina Desiana*, **Noni Afrianty****

*STIT University of Kupang.

Email: rina.desiana91@yahoo.co.id

**Islamic University of Indonesia, Yogyakarta 55281, Indonesia

Email: noniafrianty.na@gmail.com

Abstract : Every economic system is certainly based on the ideology that provides the foundation and goal on the one hand and the axioms and principles on the other. Every economic system create a framework in which a socio-economic communities can take advantage of the natural resources and human for the sake of production and distribute them for consumption. In this case, Syed NawabHaider Naqvi transform the ethical values of Islam into a set of axioms, that is tauhid (Unity), equilibrium, free will, and responsibility. A set of axioms can be used as a reference in formulating economic behavior consistent. Axiomatic approach in Islamic economics is an analytical tool used to draw up the basic elements of Islamic economics. With sourced from the Al-Qur'an and the Hadith, the Islamic ethical axiom set has been built to meet the five characteristics logically fundamental axioms of the system.

Keyword: Ethical, The Ethical Values of Islam, Islamic Economics, Four Ethical Axioms

Abstrak : Setiap sistem ekonomi tentu didasarkan pada ideologi yang memberikan dasar dan tujuan di satu sisi dan aksioma dan prinsip di sisi lain. Setiap sistem ekonomi menciptakan kerangka kerja dimana masyarakat sosio-ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan produksi dan mendistribusikannya untuk konsumsi. Dalam kasus ini, Syed NawabHaider Naqvi mengubah nilai etika Islam menjadi serangkaian aksioma, yaitu tauhid (kesatuan), keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sekumpulan aksioma dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Pendekatan aksiomatik dalam ekonomi Islam adalah alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ekonomi Islam. Dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, rangkaian aksioma etis Islam telah dibangun untuk memenuhi lima karakteristik aksioma fundamental logis dari sistem tersebut.

Kata kunci: Etika, Nilai Etika Islam, Ekonomi Islam, Empat Aksioma Etis

A. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan kesejahteraan makhluk hidup, terutama manusia. Dimana ekonomi adalah pengetahuan tentang perilaku dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan atau pribadi dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang cenderung mengarah tidak terbatas dengan dihadapkan pada sumber-sumber pemenuhan yang terbatas.¹ Lebih jelasnya adalah bahwa ilmu ekonomi adalah

kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikan untuk dikonsumsi.² Dengan demikian maka ekonomi harus ditopang oleh nilai-nilai etis yang menjunjung harkat manusia dan nilai-nilai yang tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk ekonomi. Di mana nilai-

¹Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 8

²Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 7

nilai itu dapat dijadikan dasar pandangan hidup atau dapat disebut sebagai etika.³

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang memiliki keberpihakan pada nilai etik dan agama sebagai sumber etika.⁴ Hal inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, baik kapitalis maupun sosialis. Di mana sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas.⁵ Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan individu yang luar biasa mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial.⁶ Sedangkan sistem ekonomi sosialis individu sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta negara⁷ atau dengan kata lain ekonomi sosialisme mengabaikan nilai-nilai kebebasan individu manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.⁸

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya

disatu pihak dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya dilain pihak. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikannya untuk konsumsi.⁹ Dalam hal ini Syed Nawab Haider Naqvi mentransformasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam seperangkat aksioma. Seperangkat aksioma ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten.

Penelitian ini menguraikan bagaimana perumusan kerangka aksioma dan menganalisis empat aksioma tersebut sebagai pendekatan aksioma etika Islam. Dengan demikian aksioma ini akan dijadikan acuan dimana ekonomi Islam dapat diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Penelitian ini merupakan hasil studi literatur dari pemahaman penulis. Adapun literatur utama yang menjadi dasar dalam penelitian adalah karya Syed Nawab Haider Naqvi, yaitu membahas tentang etika ekonomi Islam. Sedangkan literatur lainnya digunakan sebagai pendukung.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika

Pengertian etika dari segi bahasa berasal dari Yunani, yaitu ethos yang

³Muhammad, Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Cet.1, (Jakarta: BumiAksara, 1991), h. 3

⁴Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), Cet.1, h. 186

⁵Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 91

⁶Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, Cet.1, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 85

⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 70

⁸Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, hlm. 180

⁹Monzer Kahf, *Ekonomi...*, h. 5

berarti kebiasaan, adat, watak dan sikap. Makna kata etika ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa latin “*mores*” yang berarti adat istiadat atau cara hidup.¹⁰ Secara terminologi etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak’ sesuatu.¹¹ Dengan kata lain etika merupakan kebiasaan atau sikap yang menunjukkan nilai baik dan buruk.

Etika berkembang menjadi bidang kajian filsafat, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjuk kepada perilaku manusia.¹² Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun

sebagai kelompok.¹³ Etika merupakan suatu pengkajian secara sistematis tentang perilaku manusia dengan pertanyaan utama adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap baik dan benar. Dengan kata lain, moralitas merupakan tingkah laku kongkrit sedangkan etika bekerja pada tataran teoritis.¹⁴

Al-Qur’an mengkaitkan istilah etika dengan kata akhlak. Perkataan “*akhlaq*” berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari “*Al-Khuluq*” yaitu makna yang digunakan untuk menguraikan kata *khair*, *bir*, *qist*, *‘adl*, *haqq* dan *taqwa*. *Al-khuluq* diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran.¹⁵

Kata *Al-Khuluq* juga memiliki hubungan kata dengan “*khalqun*” yang berarti kejadian, “*khaliq*” yang berarti

¹⁰Frans Magnus Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 14

¹¹Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5

¹²Dawam Rahadjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Cet.1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 3

¹³Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, normatif dan Substansi Implementatif*, Ed.1, Cet.1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 2

¹⁴Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, h. 182

¹⁵Andi Iswandi, “Peran Etika Qur’ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.VI, No.1, Januari 2014, h. 145

pencipta dan “*makhluk*” yang berarti yang diciptakan, sehingga perumusan pengertian akhlal timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk atau antara makhluk dengan makhluk. Oleh karena itu, setiap perbuatan dan perilaku manusia, baik secara individual maupun melalui interaksi social tidak dapat dilepaskan dari pengawasan sang *khaliq*.¹⁶

Penjelasan di atas menyatakan bahwa etika dengan agama tidak dapat dipisahkan. Keberadaan agama dimaksudkan untuk mengatur semua aktivitas umat manusia agar dapat membedakan mana yang benar dan salah. Sehingga apapun yang dilakukan umat manusia dengan berlandaskan ajaran agama Islam maka sekaligus dapat dikatakan ia telah melaksanakan etika Islam.

2. Etika dalam Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (*unsur Ilahiyah*).¹⁷ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang

berlandaskan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹⁸ Jadi dalam ekonomi Islam memiliki keterkaitan dengan salah satu teori etika yaitu teori perintah Tuhan, yang mana dalam ekonomi Islam, etika berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi sistem ekonomi. Dengan demikian etika ekonomi Islam merupakan suatu usaha penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*). Kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh

¹⁶Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, h. 183

¹⁷Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol.21, No.1, Maret 2013, h. 57

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Norma ...*, h. 31

hasrat manusia saja, tetapi juga dituntun oleh pedoman-pedoman dasar syariah.¹⁹

Konteks terpenting bagi pelaku ekonomi untuk berperilaku etis karena kesuksesan tertinggi yang akan diperoleh seorang muslim adalah *falah*. *Falah* akan didapat apabila setiap muslim mengintegrasikan etika Islam dengan setiap perilaku ekonominya. Sebagai contoh dalam hal konsumsi, agar kita jangan mengkonsumsi berlebihan yang tujuannya untuk diri sendiri serta tidak mengkonsumsi harta dengan tujuan untuk perbuatan buruk. Karena hakikatnya adalah bahwa harta yang kita miliki sebagiannya adalah milik orang lain, seperti halnya dalam Firman Allah Surat Al-Isra' :26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَلَا تُبَدِّرْ بَدْرًا ۚ ٢٦

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.²⁰

3. Aksioma Etika Islam

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk

bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap ke maha kuasa Tuhan.²¹ Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksiomaetik yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi, diantaranya adalah :

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Aksioma ini menunjukkan dimensi vertikal dari sistem etika bahwa petunjuk (*hidayah*) yang benar berasal dari Allah.²² Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, social menjadi suatu “*homogeneous whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.²³

Ketundukan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensi Teomorfiknya, juga membebaskan

²¹Syed NawabHaider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003) , h. 35

²²*Ibid*, h. xiii

²³Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 11

¹⁹Andi Iswandi, “Peran Etika...”, h. 148-149
²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT Sigma ExaMedia Arkanleema, 2014), Cet. 1 h 284.

dari perbudakan manusia. Dengan demikian, manusia bisa mencapai harmonitas sosial dengan meningkatkan rasa memiliki persaudaraan universal. Secara khusus, pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu²⁴, hal ini sesuai dengan firman Allah (QS al-Hujrat:13):

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ خَلَقَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى
 وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
 وَفَقَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰبِيْرٌ ۙ ۱۳

“wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal”²⁵

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh

umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata.²⁶

Kehidupan manusia di bumi ini secara keseluruhan berada dalam konsep tauhid yang hanya berhubungan dengan Tuhan. Prinsip ini menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat serta kesatuan umat manusia. Hal ini akan membawa seseorang pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Di sini tampak jelas konsep persamaan manusia, yang merupakan implikasi dari tauhid. Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam mengutuk manusia yang berkelas-kelas. Maka, implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam ekonomi.²⁷

b. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-‘Adlwa al-Ihsan*)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal

²⁴Syed NawabHaider Naqvi, *Menggagas...*, h. 38

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 517

²⁶Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 11

²⁷Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, h. 191

ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.²⁸ Keseimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah.²⁹

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.³⁰ Di mana keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-

aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.³¹

Pada struktur ekonomi, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Jika keadilan tegak dimana-mana, maka keharmonisan sosial akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Karena prinsip keseimbangan ini akan mengantar manusia kepada pencegahan segala bentuk monopoli, penimbunan, pemborosan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok.³²

Termasuk dalam dimensi keadilan adalah pemerataan pendapatan dan kekayaan, sebab pada dasarnya Allah

²⁸Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 12

²⁹*Ibid*, h. 15

³⁰Muslich, *Etika ...*, h. 37

³¹Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 13

³²Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, h. 193

menganugerahkan alam semesta adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam pandangan Islam kekayaan tidak boleh hanya berada di tangan sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar berada dalam kemiskinan. Kekayaan alam semesta harus didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata pada akhirnya juga merupakan persyaratan penting bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.³³

c. **Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)**

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya, manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Manusia dianugerahi kebebasan untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi.³⁴ Kebebasan individu dipandu oleh pedoman yang luas dan individu

dapat melakukan perjalanan mereka sendiri, diperlukan pemikiran yang cermat untuk menafsirkan bahwa kebebasan dalam konteks sosial tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan perubahaan zaman.³⁵ Pada batas-batas tertentu, manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Dengan demikian kebebasan manusia bersifat relatif sedangkan kebebasan yang dimiliki Allah adalah absolut.

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumberdaya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumberdaya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan. Tetapi

³³*Ibid*, h. 193-194

³⁴Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 15

³⁵Ismail Sirageldin, “Elimination of Proferty: Challenges and Islamic Stategis”, *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol.8, No.1, Oktober 2000, h. 2

kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil – Nya di bumi. Oleh karena itu, seseorang tidak mempunyai suatu hak alami yang eksklusif atas apa yang ia peroleh.³⁶

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut adalah Allah, maka ia akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Dengan demikian, kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan serta dibatasi oleh tanggung jawab.

d. TanggungJawab (*Fardh*)

Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai

apa yang bebas dilakukan manusia³⁷ dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.³⁸ Al-Qur'an menegaskan dalam surat An-Nisa(4): 85 berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا
 وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً
 سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ مُّقِيتًا ٨٥

“Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya”³⁹

Maksud dari ayat tersebut bahwa suatu perbuatan akan terwujud bila mana perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas, di mana pertanggung jawaban bisa diberlakukan. Dengan demikian, semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pula pertanggung jawaban moralnya.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan

³⁷Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 16

³⁸Fauzan, “Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Filsafat Ilmu : Telaah atas Pemikiran Etika Immanuel Kant”, *Jurnal Modernisasi*, Vol.8, No.2, Juni 2012, h. 108

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 91.

³⁶Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, h. 194-195

kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang juga dapat mencemarkan kemahakuasaan Allah. Sebaliknya kepercayaan secara eksklusif didasarkan pada kemahakuasaan Allah, maka tanggung jawab manusia atas tindakannya menjadi tidak bermakna. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam kehendak bebasnya, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni: *pertama*, tanggungjawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. *Kedua*, konsep tanggungjawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap manusia wajib bertanggung

jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama dimuka bumi.⁴¹

Pada bidang ekonomi, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu karena manusia telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat lain. Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.⁴²

Mas'udul Alam Chaudary, dalam pemikiran ekonominya menyatakan bahwa prinsip ekonomi Islam yang paling utama adalah tauhid dan persaudaraan. Dalam pengertian ini persaudaraan menggambarkan sifat kemanusiaan dalam ekonomi Islam. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kerja dan produktifitas, yang mana penghargaan terhadapnya akan menciptakan profesionalisme dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip terakhir adalah

⁴⁰Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 16

⁴¹Tim Penulis FSEI, *Filsafat...*, h. 196

⁴²*Ibid.*,

mendistribusikan kekayaan.⁴³ Maka konsep nilai sistem ekonomi Islam menurutnya berangkat dari sebuah prinsip fundamental Islam yang telah ditawarkan oleh Naqvi, yaitu meliputi tauhid, khilafah (kebebasan dan tanggung jawab), dan keadilan (keseimbangan).

4. Membangun Kerangka Aksioma Etika Islam

Seperti yang telah disebutkan oleh Naqvi bahwa etika Islam merupakan representasi dari dalam seperangkat aksioma yang mencakup empat elemen, yaitu kesatuan/Tauhid (*Unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*), dan tanggung jawab (*Responsibility*). Secara logis dapat dikatakan bahwa keempat perangkat tersebut memiliki semua ciri sebagai perangkat yang memadai, yakni perangkat yang berfungsi dalam konteks sekarang sebagai dasar perumusan pernyataan-pernyataan ekonomi.⁴⁴ Tetapi seperangkat prinsip etik harus secara memadai merangkum filsafat etika Islam. Maka perangkat-perangkat tersebut harus mencakup seluruh

aspek yang relevan untuk menyimpulkan aturan-aturan perilaku ekonomi, tidak hanya aspek etika Islam saja. Namun begitu, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, perangkat-perangkat itu harus komprehensif.

Upaya mencari dasar etika ekonomi Islam tersebut, Naqvi berpendapat bahwa agama dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadits dijadikan sumber pokok yang dapat digunakan untuk menyimpulkan prinsip-prinsip umum perilaku ekonomi Islam.⁴⁵ Agama Islam dalam konteks Al-Quran dan Hadits digunakan sebagai sumber semata-mata karena pelaku ekonomi mempercayainya, dan sebagai sumber rujukan pertama yang digunakan oleh pelaku ekonomi. Yang mana Al-Quran merupakan *kallamu Allah*, dan Hadits merupakan *bayanu kallamu Allah*. Sehingga aspek keimanan manusia merupakan hal penting dalam memposisikan Al-Quran dan Hadits sebagai wilayah kajian.

Seperangkat aksioma etik yang diajukan ini adalah *non-trivial*, artinya bahwa tidak ada perangkat yang dicirikan atau diisi oleh sesuatu yang

⁴³Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Terj. Ikhwan Abidin B, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132-135.

⁴⁴Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economica: An Islamic Synthesis*, Terj. Husin Anis dan Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1985), h. 69.

⁴⁵Jauhar Faradis, "Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam (Kajian Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dalam Menggagas Ekonomi Islam)", *Jurnal Literasi*, Ed. 2, Juni 2009, h. 45.

bersifat *non-trivial*. Yang mana merupakan perangkat minimal dalam pengertian untuk menyusun suatu dasar. Disamping itu, aksioma etik juga harus komprehensif untuk membangun kerangka aksioma etik ekonomi Islam, sehingga menghasilkan prinsip-prinsip ekonomi dengan tingkat generalitas yang memadai, maka Naqvi menyatakan bahwa aksioma etik tersebut harus memenuhi lima sifat yaitu:

- a. Perangkat tersebut harus merupakan representasi pandangan yang memadai dan *legitimate* tentang etika Islam. Sifat ini bisa menghilangkan kesewenangan subyektif dalam memilih aksioma-aksioma etik, karena hanya yang memenuhi syarat saja (yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah) yang bisa menjadi perangkat tersebut.
- b. Kumpulan aksioma itu harus merupakan suatu perangkat yang memadai, dan berbentuk suatu dasar. Sifat ini dapat menghasilkan pernyataan ekonomi yang signifikan.
- c. Berkaitan dengan independensi. Sifat ini penting bagi validitas sistem aksioma etik. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada

elemen dalam perangkat itu, yang bisa dideduksi dari perangkat elemen lain dan elemen tersebut akan independen.

- d. Semua elemennya harus konsisten satu sama lain. Artinya menunjukkan bahwa tak satupun dari elemen dalam perangkat ini bisa dideduksi dengan cara sedemikian sehingga satu elemen bisa bertentangan dengan yang lain. Pengujian yang konsisten juga dapat dilakukan dalam pengertian yang lebih *heuristik*, bahwa kebenaran satu aksioma harus tidak mengingkari kebenaran aksioma lain dalam perangkat itu, dan masing-masing aksioma dalam perangkat tersebut harus menunjukkan kebenaran umum tentang sistem sebagai suatu keseluruhan.
- e. Sifat kelima ini, perangkat tersebut harus berkaitan dengan daya prediktifnya yang mampu menjelaskan secara maksimum dari gejala tertentu dengan mengacu pada prinsip yang terkandung dalam keempat aksioma etik tersebut.⁴⁶

Disamping pemenuhan kelima sifat formal aksioma etik tersebut

⁴⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economica...*, h. 64-66.

harus juga dicari suatu pemahaman terhadap fenomena sosial yang menyertai perilaku ekonomi manusia. Karena perilaku manusia tidak lepas dari kehidupan sosialnya, yaitu perilaku atas interaksi antar manusia tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwa perangkat aksioma etik tersebut mencerminkan pesan sentral filsafat sosial Islam yaitu penolakan terhadap *status quo* yang tidak berkeadilan dan tuntutan terhadap perubahan sosial apabila diperlukan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa aksioma tersebut bersifat independen satu sama lain. Dengan demikian, jika Kesatuan, merupakan dimensi vertikal, Kesejajaran merupakan dimensi horisontal, Kehendak Bebas, dapat melahirkan anarki terhadap harmonitas sosial, sedangkan Tanggung-jawab, jika didorong begitu jauh dapat menjadi destruktif terhadap kebebasan manusia, dengan demikian menjadi sumber *Zulm* (ketidaksejajaran). Maka, tidak ada satu pun elemen yang tidak bermanfaat, keempat elemen aksioma tersebut dibutuhkan sesuai dengan proporsinya.

Perangkat itu konsisten dapat ditentukan dengan menunjukkan bahwa tidak mungkin menarik

kesimpulan apapun darinya, sehingga kebenaran dari satu aksioma tidak bertentangan dengan aksioma lain dalam perangkat itu. Empat aksioma tersebut menyoroti sejumlah aspek penting dari filsafat etika Islam yang bertujuan untuk menghasilkan tatanan sosial ekonomis dan harmonis bagi manusia yang bebas, bertanggungjawab tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga kesejahteraan orang lain dalam masyarakat dan menuntut tidak hanya peningkatan kesejahteraan material, tetapi dalam kesejahteraan spiritual mereka. Dengan demikian, bahwa sistem aksioma etik dapat menambah pemahamana kita tentang hakekat sistem etika Islam.

Benang merah yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut adalah empat aksioma etik Islam yang ditawarkan oleh Naqvi tidak kurang dan tidak lebih. Dan seperangkat aksioma etika Islam tersebut telah memenuhi kelima karakteristik pokok sistem aksioma secara logis, baik minimal, konsisten, independen, dan dapat membuat prediksi yang berarti tentang ekonomi Islam. Tawaran Naqvi dalam membangun kerangka aksioma etik Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Sehingga tidak

memisahkan prinsip moral masyarakat muslim dalam perumusan prinsip-prinsip yang secara logis valid tentang perilaku ekonomi.

5. Analisis Pendekatan Aksioma Etika Islam

Aksioma etika Islam yang ditawarkan oleh Naqvi merupakan bentuk dari ajaran agama Islam itu sendiri dan merupakan bagian yang integral. Maka dalam ekonomi Islam, etika ada pada posisi penting dan merupakan unsur yang integral pula dalam sistem ekonomi, yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oleh karenanya, ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif.

Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Maka etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Karena dalam Islam etikalah yang harus menguasai ilmu ekonomi bukan sebaliknya. Penjelasan, pemahaman, dan penilaian atas perilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolut.

Prosedur untuk mendeduksi pernyataan-pernyataan ekonomi dari aksioma-aksioma etik, secara ilmiah merupakan prosedur yang benar dan juga mampu menghasilkan serangkaian hipotesis yang bisa diuji tentang ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam mengantar kita untuk membahas masalah baru, serta menggabungkan antara etika dan ekonomi ke dalam suatu *frame-work* tunggal. Juga ditawarkan *frame-work* analisis yang tepat terhadap masalah tersebut. Dalam pengertian ini, ilmu ekonomi Islam bisa dipandang sebagai suatu program penelitian ilmiah.

Maka pendekatan aksiomatik dalam ekonomi Islam merupakan alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ilmu ekonomi Islam. Penerapan pendekatan ini secara konsisten akan menghasilkan bagian ilmu ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan aksioma etika Islam ke dalam model ekonomi Islam. Sebab karna itulah dikatakannya bahwa sistem aksioma etika Islam yang ditawarkan Naqvi merupakan representasi yang memadai dari sudut pandang etika Islam dan sebagai alat untuk analisis untuk menggali lebih dalam lagi tentang hakikat ekonomi Islam itu sendiri.

Pada pembahasannya tentang empat aksioma etika Islam, Naqvi mampu membuktikan bagaimana konsep tauhid dan keseimbangan terdapat keterkaitan antara keduanya, yaitu dapat digunakan sebagai sarana-sarana analitis untuk menyusun landasan teori ekonomi Islam. Yaitu seperti menangani masalah-masalah cara produksi, peranan teknologi, dan pembagian sumber-sumber alam yang selama ini luput dari perhatian ahli moneter muslim.

Begitu pula pada prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab. Pada dasarnya saling terkait dan menuntut terwujudnya sebuah masyarakat yang bebas secara politik dan ekonomi, sekaligus bebas dari egoisme, ketamakan, dan, kerusakan. Sebuah kebebasan yang berakar pada kecintaan yang kuat untuk berbuat baik bagi sesama walaupun mengorbankan sebagian kesejahteraan diri sendiri, hal ini menyatakan bahwa kewajiban lebih dahulu daripada hak, dan kepentingan orang lain lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.

Kekuatan dan kelebihan dari pendekatan aksiomatis adalah bahwa pendekatan tersebut tidak hanya menyediakan sarana-sarana bagi

analisis dan menuntun pencarian, tetapi juga menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk dijalankan. Tetapi demikian, terdapat kelemahannya, yaitu bahwa Naqvi belum mampu menemukan dan membangun lembaga-lembaga yang dapat menyingkirkan bunga atau riba. Karena bunga atau riba tersebut sangat bertentangan dengan empat aksioma etika ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Naqvi sendiri. Dapat dibuktikan bahwa bunga atau riba tersebut akan merusak salah satu atau bahkan seluruh aksioma etika ekonomi Islam tersebut. Jika saja bunga atau riba tersebut dapat digantikan dengan mekanisme finansial yang dibenarkan dalam Islam, maka akan terjadi perubahan-perubahan struktural yang mencakup sangat luas.

Ekonomi Islam merupakan hasil analisis dan praktek yang dilakukan oleh umat Islam, yang pastinya tidak akan pernah luput dari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Setidaknya terdapat tiga aspek dalam menganalisis ekonomi, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, serta aplikasi dan analisis sejarah. Maka dalam konteks inilah pendekatan aksioma Naqvi menjadi signifikan.

Kerana ekonomi Islam bukanlah hanya bidang kajian berdasarkan persoalan nilai saja, tetapi juga pada bidang keilmuan.

Ilmu dan nilai yang terpadu menjadi satu, menjadikan ekonomi Islam produk hasil perpaduan dari kedua hal tersebut, serta menjadikan ilmu ekonomi sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat dan bersosialisasi. Yang mana ekonomi Islam sebagai ilmu dapat dicerna dengan menggunakan metode-metode pengetahuan pada umumnya, sehingga ekonomi Islam bisa dikaji, dikembangkan, dan dipraktikkan.

C. PENUTUP

Ekonomi Islam dan etika menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena masalah ekonomi akan selalu sampai pada titik temunya dengan etika, sebab yang menjadi subjeknya adalah manusia dalam suatu masyarakat yang tidak terlepas dari suatu pandangan etis. Perangkat aksioma mencerminkan pesan sentral filsafat sosial Islam yaitu penolakan terhadap *status quo* yang tidak berkeadilan dan tuntutan terhadap perubahan sosial. Postulat umum yang terdapat dalam teori ekonomi Islam, yaitu

penggabungan ilmu ekonomi dan etika yang telah dielaborasi oleh Naqvi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol.21, No.1, 2013
- Badroen, Faisal, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Chapra, Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Terj. Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Faradis, Jauhar, "Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam (Kajian Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dalam Menggagas Ekonomi Islam)", *Jurnal Literasi*, Ed. 2, 2009
- Fauzan, "Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Filsafat Ilmu : Telaah atas Pemikiran Etika Immanuel Kant", *Jurnal Modernisasi*, Vol.8, No.2, 2012
- Zadjuli, Imam, Suroso, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999
- Iswandi, Andi, "Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.VI, No.1, 2014
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, Bandung: PT Sigma ExaMedia Arkanleema, 2014
- Muhammad, Nejatullah Siddiqi, , *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Jakarta: BumiAksara, 1991
- Muhammad dan Lukman Fauroni, , *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, normatif dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- _____, *Ethics and Economica: An Islamic Synthesis*, Terj. Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung : Mizan, 1985
- Rahadjo, Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1990
- Sirageldin, Ismail, "Elimination of Proferty: Challenges and Islamic Stategis", *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol.8, No.1. 2000
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Suseno, Frans Magnus, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, Jakarta: Robbani Press, 2001
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997